

NOTA DINAS
No. 152/ND/XVIII.SRG/06/2023

Kepada Yth : Kepala Ditama Revbang
Dari : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Profil Risiko BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2023
Tempat, tanggal : Serang, 23 Juni 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Ditama Revbang Nomor 166/ND/XII/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permintaan Penyampaian Profil Risiko SKPR Eselon I dan Eselon II BPK Tahun 2023 (terlampir), bersama ini kami sampaikan Profil Risiko BPK Perwakilan Banten tahun 2023 yang meliputi 6 Risiko Strategis dan 22 Risiko Operasional.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Emmy Mutiarini S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CSFA
NIP.197109281997032004



Tembusan:
Yth. Tortama KN V.

PROFIL RISIKO
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

Profil Risiko "RS-1. Kinerja BPK belum berkesinambungan antar periode Renstra"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RS-01	Strategis	Jarang Terjadi (2)	Signifikan (4)	Sedang (13)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 Keputusan Sekjen BPK Nomor 289/K/X-XIII.2/6/2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja. Keputusan Sekjen BPK Nomor 514/K/X-XIII.2/12/2014 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kinerja Unit/Satuan Kerja BPK. Keputusan Sekjen BPK Nomor 444/K/X-XIII.2/11/2009 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Tingkat Kehandalan Sistem Manajemen Kinerja BPK. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi Renstra kepada pegawai. Melakukan koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renstra. Melaksanakan pelatihan pegawai untuk mendapatkan pemahaman terkait SDGs dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Menyusun rencana dan pelaksanaan pemeriksaan yang mengakomodir SDGs dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Menerapkan Perjanjian Kinerja dengan semua pegawai untuk memastikan tercapainya kinerja satker yang selaras dengan Renstra.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko EndG	Level Dampak				
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
5 Hampir Pasti Terjadi	8	15	18	25	30
4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
3 Kadangkala Terjadi	4	10	14	17	21
2 Jarang Terjadi	2	7	11	14	18
1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	12

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RS-2. Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RS-02	Strategis	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3. Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)				
		1	2	3	4	5
Level Risiko (LR)	1 Sangat Tinggi	5	10	15	20	25
	2 Tinggi	4	8	12	16	20
	3 Sedang	3	6	9	12	15
	4 Rendah	2	4	6	8	10
	5 Sangat Rendah	1	2	3	4	5

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. SPKN. 2. SPKM. 3. Peraturan BPK No.2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK. 4. Peraturan BPK No. 2019 tentang organisasi tata laksana BPK khususnya tentang Manajemen Pemeriksaan. 5. Juklak dan Juknis Pemeriksaan 6. Kebijakan Pemeriksaan LKPD 7. Reviu berjenjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 3. Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana pemeriksaan yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. 4. Melakukan koordinasi melalui Pokja agar rekomendasi yang diberikan antar AKN seragam. 5. Menyusun rencana <i>Risk Based Audit</i> di setiap pemeriksaan.

Level Risiko	Dasaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Jingga
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	8 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 7	Biru

Profil Risiko "RS-4. Hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana terlambat atau tidak dilaporkan kepada instansi yang Berwenang sesuai ketentuan yang berlaku"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RS-04	Strategis	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko SoS	Level Dampak				
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
5 Hampir Pasti Terjadi	5	17	18	20	25
4 Sering Terjadi	4	12	16	19	24
3 Kedang Terjadi	3	8	14	17	21
2 Jarang Terjadi	2	7	13	15	18
1 Hampir Tidak Terjadi	1	5	9	11	14

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Pasal 14(1) dan Pasal 26 (1)) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (Pasal 28 poin a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan BPK nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang MKKE BPK. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang PI, PKN dan PKA Keputusan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang PMPI, PKN dan PKA Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Juklak PI dan PKN Keputusan BPK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi Berwenang. SPKN. Keputusan BPK No.5 Tahun 2015 tentang PMP. 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi pemahaman atas temuan berindikasi pidana dan mekanisme pelaporannya. Melakukan konsultasi dengan Binbangkum dan AUI atas hasil pemeriksaan yang mengandung risiko <i>fraud</i>. Menyusun dan menetapkan tata kelola IATF untuk pembentukan dan percepatan implementasi IATF yang dibarengi dengan komitmen pimpinan satker untuk memberdayakan unit IATF di Perwakilannya. Menjalin komunikasi dan menyusun perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi sebagai ketentuan pelaksanaan dari MoU antara BPK dengan Polri di tingkat Perwakilan. Menyusun sistem informasi terkait pelaporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Menyusun kajian penambahan struktur organisasi perwakilan yang memiliki tusi PI, PKN, PKA.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	8 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	5 - 7	Biru

Profil Risiko "RS-5. BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RS-05	Strategis	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan. 2. Manajemen Pengetahuan. 3. Manajemen Risiko. 4. Renstra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun mekanisme yang mengatur komunikasi/koordinasi antara AUI dengan AKN/Perwakilan pengampu portofolio atas pemilihan temuan-temuan pemeriksaan yang akan menjadi objek Penelahaan Informasi Awal oleh AUI. 2. Menyusun profil risiko entitas dan program strategis pemerintah, termasuk <i>emerging risks</i>.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko GoS	Level Dampak				
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
5 Hampir Pasti Terjadi	8	15	18	20	25
4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	21
2 Jarang Terjadi	3	7	11	13	16
1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	10

Level Risiko	Skor Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	10 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 9	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RS-6. Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RS-06	Strategis	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. SPKN, PMP, Juklak, Juknis Pemeriksaan. 2. <i>Review</i> berjenjang. 3. Pemenuhan jam pelatihan (40 JP). 4. Aplikasi pemeriksaan SIAP 5. Hot Reviu dan Cold Reviu oleh Itama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa). 2. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan. 3. Melaksanakan rapat pokja, <i>workshop</i> LKKL/LKPD/Kinerja Tematik. 4. Melakukan sosialisasi peraturan terkait pemeriksaan. 5. Menyusun rencana <i>Risk Based Audit</i> di setiap pemeriksaan. 6. Menerapkan mekanisme <i>cross review</i> antar tim pemeriksa

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	Eks	Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4 Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3 Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2 Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Level Risiko	Daerah Risiko	Warna
Sangat Tinggi (25)	20 - 25	Merah
Tinggi (14)	16 - 19	Oranye
Seimbang (8)	12 - 15	Kuning
Rendah (3)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RS-7. Penyelesaian kasus TP/TGR berlurut-lurut"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Setelah Penanganan
Risiko Strategis						
RS-07	Strategis	Kadang Terjadi (3)	Moderat (3)	Sedang (14)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	Sangat Signifikan	Level Dampak				
		1	2	3	4	5
5 Sangat Tinggi	5	10	15	20	25	30
4 Tinggi	4	8	12	16	20	24
3 Kadangan	3	6	9	12	15	18
2 Sedang	2	4	6	8	10	12
1 Rendah	1	2	3	4	5	6

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. 3. Keputusan BPK Nomor 1/K/I.XIII.2/3/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan TLHP BPK. 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK. 5. Pelaksanaan PTLRHP setiap semester. 6. Keputusan BPK No.5 Tahun 2012 tentang Juknis Pemantauan Kerugian Negara. 7. Peraturan Mendagri No.133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisir dan menyusun strategi percepatan penyelesaian kasus TP/TGR. 2. Melakukan koordinasi dengan auditee dan APH terkait kasus TP/TGR dan penyusunan <i>task force</i>. 3. Melakukan penetapan satker yang akan ditugaskan untuk melakukan pemantauan kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan. 4. Menetapkan secara jelas antara LHP regular, LHP Investigasi, dan putusan pengadilan, nilai kerugian negara mana yang harus dipantau oleh BPK.

Level Risiko	Batasan Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	9 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 8	Biru

Profil Risiko "RO-1. Penerimaan gratifikasi, suap dan terlibat pemerasan terkait pemeriksaan"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RO-01	Operasional - <i>Fraud</i>	Jarang Terjadi (2)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (21)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisa Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisa Risiko	Level Dampak				
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kejadian	5 Sangat Terjadi	21	15	10	5
	4 Sedang Terjadi	14	10	7	5
	3 Cukup Terjadi	7	5	4	3
	2 Jarang Terjadi	4	3	2	2
	1 Tidak Terjadi	2	2	2	2

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik. 2. Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik. 3. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 4. Keputusan Sekjen Nomor 305a Tahun 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana BPK. 5. Keputusan Sekjen Nomor 507 Tahun 2011 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di BPK. 6. Keputusan Sekjen Nomor 438 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Keputusan Sekjen Nomor 501 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPK. 8. Keputusan Sekjen Nomor 49 Tahun 2017 tentang POS Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK. 9. Peraturan Sekjen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) di BPK. 10. Peraturan Sekjen Nomor 8 Tahun 2018 tentang POS Penyerahan LHR dan LHP Internal yang Berindikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin kepada Inspektorat Penegakan Integritas. 11. Peraturan Sekjen Tentang Pedoman Pengembangan dan Internalisasi Budaya Kerja di BPK (Konsep). 12. Sistem pelaporan gratifikasi: ppg.bpk.go.id 13. Sistem pelaporan WBS: wbs.bpk.go.id 14. Monitoring pelanggaran Etik dan Disiplin 	<p>Penerapan Integritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun budaya integritas <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Komitmen dari Pimpinan BPK dan Manajemen Senior atas Budaya Integritas. b. Melakukan Diseminasi, sosialisasi dan pelatihan atas Budaya Integritas dan pelaporan gratifikasi. c. Pernyataan tentang tanggung jawab Pimpinan Satker jika terjadi pelanggaran. d. Membuat profiling terhadap pegawai di bawahnya yang terdokumentasi oleh pimpinan satker. e. Mengkomunikasikan kode etik dalam surat tugas (ST) dan peyampaian nilai IIP kepada entitas pada saat <i>entry meeting</i>. f. Mempromosikan budaya lapor dan adu atas dugaan pelanggaran. g. Pemberian reward kepada pegawai teladan secara periodik. 2. Membangun sistem Integritas Melaksanakan Rotasi internal untuk menghindari pemeriksa yang sama melakukan pemeriksanaan atas instansi yang sama lebih dari 3 kali secara berurutan.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	10 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 9	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-2. Adanya Kejadian OTT"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RO-02	Operasional - Fraud	Jarang Terjadi (2)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (21)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik. 2. Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik. 3. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 4. Keputusan Sekjen Nomor 305a Tahun 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana BPK. 5. Keputusan Sekjen Nomor 507 Tahun 2011 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di BPK. 6. Keputusan Sekjen Nomor 438 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Keputusan Sekjen Nomor 501 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPK. 8. Keputusan Sekjen Nomor 49 Tahun 2017 tentang POS Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK. 9. Peraturan Sekjen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) di BPK. 10. Peraturan Sekjen Nomor 8 Tahun 2018 tentang POS Penyerahan LHR dan LHP Internal yang Berindikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin kepada Inspektorat Penegakan Integritas. 11. Peraturan Sekjen Tentang Pedoman Pengembangan dan Internalisasi Budaya Kerja di BPK (Konsep). 12. Sistem pelaporan gratifikasi: ppg.bpk.go.id 13. Sistem pelaporan WBS: wbs.bpk.go.id 14. Monitoring pelanggaran Etik dan Disiplin 	<p>Penerapan Integritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun budaya integritas <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Komitmen dari Pimpinan BPK dan Manajemen Senior atas Budaya Integritas. b. Melakukan Diseminasi, sosialisasi dan pelatihan atas Budaya Integritas dan pelaporan gratifikasi. c. Pernyataan tentang tanggung jawab Pimpinan Satker jika terjadi pelanggaran. d. Membuat profiling terhadap pegawai di bawahnya yang terdokumentasi oleh pimpinan satker. e. Mengkomunikasikan kode etik dalam surat tugas (ST) dan peyampaian nilai IIP kepada entitas pada saat entry meeting. f. Mempromosikan budaya lapor dan adu atas dugaan pelanggaran. g. Pemberian reward kepada pegawai teladan secara periodik. 2. Membangun sistem Integritas Melaksanakan Rotasi internal untuk menghindari pemeriksa yang sama melakukan pemeriksaan atas instansi yang sama lebih dari 3 kali secara berurutan.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kejadian	5 Sangat Tinggi	3	15	15	25	25
	4 Tinggi	4	16	16	24	24
	3 Sedang	4	12	11	11	11
	2 Rendah	3	9	10	11	11
	1 Sangat Rendah	1	2	3	3	3

Level Risiko	Desaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	15 - 19	Jingga
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	8 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-3. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik terkait pemeriksaan ataupun non pemeriksaan"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RO-03	Operasional - <i>Fraud</i>	Hampir Tidak Terjadi (1)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (20)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	EoS	Level Dampak				
		1 Tinggi Signifikan	2 Meras	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	5	15	10	5	5
	4 Sangat Terjadi	4	12	8	4	4
	3 Kedang Terjadi	3	9	6	3	3
	2 Jarang Terjadi	2	6	4	2	2
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	2	1	1

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik. 2. Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik. 3. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 4. Keputusan Sekjen Nomor 305a Tahun 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana BPK. 5. Keputusan Sekjen Nomor 507 Tahun 2011 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di BPK. 6. Keputusan Sekjen Nomor 438 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Keputusan Sekjen Nomor 501 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPK. 8. Keputusan Sekjen Nomor 49 Tahun 2017 tentang POS Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK. 9. Peraturan Sekjen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) di BPK. 10. Peraturan Sekjen Nomor 8 Tahun 2018 tentang POS Penyerahan LHR dan LHP Internal yang Berindikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin kepada Inspektorat Penegakan Integritas. 11. Peraturan Sekjen Tentang Pedoman Pengembangan dan Internalisasi Budaya Kerja di BPK (Konsep). 12. Sistem pelaporan gratifikasi: ppg.bpk.go.id 13. Sistem pelaporan WBS: wbs.bpk.go.id 14. Monitoring pelanggaran Etik dan Disiplin 	<p>Penerapan Integritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun budaya integritas <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Komitmen dari Pimpinan BPK dan Manajemen Senior atas Budaya Integritas. b. Melakukan Diseminasi, sosialisasi dan pelatihan atas Budaya Integritas dan pelaporan gratifikasi. c. Pernyataan tentang tanggung jawab Pimpinan Satker jika terjadi pelanggaran. d. Membuat profiling terhadap pegawai di bawahnya yang terdokumentasi oleh pimpinan satker. e. Mengkomunikasikan kode etik dalam surat tugas (ST) dan peyampaian nilai IIP kepada entitas pada saat entry meeting. f. Mempromosikan budaya lapor dan adu atas dugaan pelanggaran. g. Pemberian reward kepada pegawai teladan secara periodik. 2. Membangun sistem Integritas Melaksanakan Rotasi internal untuk menghindari pemeriksa yang sama melakukan pemeriksanaan atas instansi yang sama lebih dari 3 kali secara berurutan.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-4. Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RO-04	Operasional - <i>Fraud</i>	Hampir Tidak Terjadi (2)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (21)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Sekretariat	Rendah

Kejadian Risiko Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik. 2. Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik. 3. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 4. Keputusan Sekjen Nomor 305a Tahun 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana BPK. 5. Keputusan Sekjen Nomor 507 Tahun 2011 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di BPK. 6. Keputusan Sekjen Nomor 438 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Keputusan Sekjen Nomor 501 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPK. 8. Keputusan Sekjen Nomor 49 Tahun 2017 tentang POS Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK. 9. Peraturan Sekjen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) di BPK. 10. Peraturan Sekjen Nomor 8 Tahun 2018 tentang POS Penyerahan LHR dan LHP Internal yang Berindikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin kepada Inspektorat Penegakan Integritas. 11. Peraturan Sekjen Tentang Pedoman Pengembangan dan Internalisasi Budaya Kerja di BPK (Konsep). 12. Sistem pelaporan gratifikasi: ppg.bpk.go.id 13. Sistem pelaporan WBS: wbs.bpk.go.id 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara berkala atas Pegawai yang Dijatuhi Hukuman. 2. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko S&S	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	4	15	18	20	22
	4 Sering Terjadi	4	12	16	19	21
	3 Kedang Terjadi	4	10	14	17	20
	2 Jarang Terjadi	2	7	10	12	15
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-5. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan terlambat"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RO-05	Operasional - Ketaatan	Hampir Tidak Terjadi (1)	Moderat (3)	Sangat Rendah (5)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat	Sangat Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> UU nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kode Etik. SPKN, PMP, Juklak Juknis. Kebijakan Pemeriksaan LKPD Reviu berjenjang sesuai PMP. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan. Melakukan <i>Monitoring</i> pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat. Melaksanakan rapat pokja AKN. Menyusun <i>Risk Based Audit</i> dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Matris Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	Sudut	Level Dampak				
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	1 Sangat Tinggi	4	15	18	20	25
	4 Sangat Tinggi	6	12	18	18	20
	3 Kedang Tinggi	3	9	18	17	20
	2 Jatuh Tinggi	2	7	11	12	16
	1 Sangat Tidak Tinggi	1	5	9	8	10

Level Risiko	Desain Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Kedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-6. Keterlibatan Pelaksana dalam Organisasi Terlarang/ radikalisme/ terorisme"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RO-06	Operasional - Ketaatan	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Surat Edaran MenpanRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Sistem pelaporan WBS: wbs.bpk.go.id. 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK dengan narasumber dari BPK atau BIN/BNPT. Memantau berkala atas pelaksana BPK yang telah di jatuhkan hukuman. Melakukan pelatihan terkait wawasan kebangsaan.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)				
		Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Moderat (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)
Level Kemungkinan	Sangat Rendah (1)	1	2	3	4	5
	Rendah (2)	2	3	4	5	6
	Moderat (3)	3	4	5	6	7
	Tinggi (4)	4	5	6	7	8
	Sangat Tinggi (5)	5	6	7	8	9

Level Risiko	Skor Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Rendah
Tinggi (4)	16 - 19	Rendah
Sedang (3)	12 - 15	Rendah
Rendah (2)	8 - 11	Rendah
Sangat Rendah (1)	1 - 7	Rendah

Profil Risiko "RO-7. Rekomendasi RB Tidak Ditindaklanjuti"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Strategis						
RO-07	Operasional - Kepatuhan	Hampir Tidak Terjadi (1)	Moderat (3)	Sangat Rendah (5)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Sangat Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Permenpan No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Pemantauan Tindak Lanjut Reviu RB oleh Itama. 	Melakukan evaluasi pemantauan rekomendasi RB secara berkala melalui aplikasi Wasma dan menyusun strategi penyelesaiannya.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko SoS	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	8	15	18	20	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Endang Terjadi	4	10	14	17	21
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	16
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	6	8

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Orange
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-8. Adanya Gangguan Independensi dalam pelaksanaan tugas (*conflict of interest*, intimidasi, dan sebagainya)"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-08	Operasional - Ketaatan	Hampir Tidak Terjadi (1)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (20)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matris Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	Tingkat Kejadian	Level Dampak				
		1	2	3	4	5
Level Kemungkinan	Sangat Tinggi	6	12	18	24	30
	Tinggi	4	8	12	16	20
	Sedang	3	6	9	12	15
	Rendah	2	4	6	8	10
	Sangat Rendah	1	2	3	4	5

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Keputusan BPK Nomor 5 Tahun 2015 tentang PMP. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi atas Budaya IIP. Menyusun surat pernyataan gangguan independensi oleh Pimpinan unit terkait untuk memastikan bahwa tim pemeriksa dan tim pereriu tidak memiliki hubungan darah dengan pegawai di satker yang akan di audit/ direviu. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaksana BPK. Melakukan mutasi internal pegawai dalam satker bersangkutan secara berkala.

Level Risiko	Skor Risiko	Warna
Sangat Tinggi (20)	20 - 25	Merah
Tinggi (14)	16 - 19	Oranye
Sedang (12)	12 - 15	Kuning
Rendah (8)	8 - 11	Hijau
Sangat Rendah (4)	4 - 7	Biru

Profil Risiko "RO-9. Kehilangan aset pengetahuan BPK"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Setelah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-09	Operasional - Kepatuhan	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Sekjen No.60 Tahun 2019 tentang Pedoman MP BPK. 2. Peraturan Sekjen No.79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas MP BPK. 3. Keputusan Sekjen No.284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan <i>Best Practices</i>. 4. Pengukuran kinerja implementasi MP. 5. Pengakuan angka kredit untuk jabatan fungsional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan KTF Secara berkala. 2. Melaksanakan <i>capacity building</i> bagi pegawai secara berkala. 3. Menyimpan materi <i>sharing session</i> di portal satker.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko S&S	Level Dampak				
	1	2	3	4	5
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
5 Hampir Pasti Terjadi	9	18	18	36	36
4 Sering Terjadi	8	16	16	32	32
3 Kadang Terjadi	4	12	12	24	24
2 Jarang Terjadi	2	6	6	12	12
1 Hampir Tidak Terjadi	1	2	2	4	4

Level Risiko	Beban Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-10. Pengendalian internal dan Manajemen Sumber Daya di BPK belum mendukung proses bisnis BPK"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-10	Operasional - Kepatuhan	Kadang Terjadi (3)	Moderat (3)	Sedang (14)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Kejadian Risiko	Pengendalian internal dan Manajemen Sumber Daya di BPK belum mendukung proses bisnis BPK
-----------------	--

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. 2. Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang PMP. 3. Juklak dan Juknis Pemeriksaan. 4. <i>Review</i> berjenjang. 5. Pemenuhan jam pelatihan (40 JP). 6. Renstra BPK. 	Melakukan pelatihan bagi pelaksana BPK baik terkait manajemen risiko, manajemen pengetahuan, SAKIP, dsb.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	ES	Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	4	15	18	21	26
	4 Sering Terjadi	6	12	15	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	11	14	17	21
	2 Jarang Terjadi	3	7	9	11	14
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	4	5	7

Level Risiko	Daerah Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-11. Pembentukan Budaya Organisasi belum didukung Manajemen Perubahan Yang Komprehensif"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-11	Operasional - Kepatuhan	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Kejadian Risiko	Pembentukan Budaya Organisasi belum didukung Manajemen Perubahan Yang Komprehensif
-----------------	--

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
1. Pedoman pengelolaan Inisiatif Strategis. 2. Keputusan Sekjen No.284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan <i>Best Practices</i> .	Membentuk Agen Perubahan.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko EsS	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	6	15	18	20	25
	4 Sering Terjadi	6	12	18	19	20
	3 Kedang Terjadi	4	10	14	17	18
	2 Jarang Terjadi	2	7	9	11	12
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	5	5	6	7

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-12. Pencapaian Kinerja TLRHP belum Mencapai Target"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-12	Operasional - Kepatuhan	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Pasal 26 Peraturan BPK No.2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK. Aplikasi SIPTL. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan recommitmen penyelesaian PTLRHP. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan dengan entitas terkait terutama inspektorat untuk meningkatkan komitmen penyelesaian TLRHP secara berkala. Melakukan inventarisasi atas Tindak Lanjut yang stagnan/tidak bergerak dan strategi percepatannya. Menyusun kajian dan merumuskan Kebijakan BPK tentang penerapan Pasal 20 ayat 5 dan Pasal 26 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2004 yang mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana atau denda atas kewajiban pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tanpa alasan yang sah. Merumuskan kebijakan penyelesaian rekomendasi yang berlarut-larut (lebih dari 5 tahun).

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko S&S	Level Dampak				
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
5 Hampir Pasti Terjadi	1	15	18	20	25
4 Sering Terjadi	4	12	16	19	24
3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	21
2 Jarang Terjadi	2	7	10	13	16
1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	7	9

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-15. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPK tidak Didukung Anggaran yang Memadai"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Setelah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-15	Operasional - Keuangan	Jarang Terjadi (2)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (21)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko: End	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Rendah	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kejadiannya	5 Sangat Terjadi	6	15	24	33	42
	4 Sering Terjadi	8	20	30	40	50
	3 Cukup Terjadi	10	15	20	25	30
	2 Jarang Terjadi	12	18	24	30	36
	1 Sangat Jarang Terjadi	14	21	28	35	42

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Permenkeu No. 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. RKT. RKA. RKP/RKSP. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya. Melakukan penyesuaian <i>output</i> apabila ada pemotongan anggaran. Menyusun kajian dan merancang peningkatan efisiensi kegiatan dengan optimalisasi penerapan <i>remote</i> atau <i>online</i> baik dalam pemeriksaan maupun penunjang dan kesetjanaan, dengan memanfaatkan IT. Pemeriksaan onsite dan kunjungan secara fisik dilakukan apabila kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara <i>online</i> atau <i>remote</i>. <p>Masukan dari Perwakilan Provinsi Banten Pada Perwakilan level kemungkinan (LK) kadang terjadi (3) dan Level Dampak (LD) sangat signifikan (5) sehingga Level Risiko (LR) Sangat Tinggi (22) karena seringkali penganggaran yang diberikan khususnya untuk kegiatan non pemeriksaan tidak mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya.</p>

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-16. Berita Negatif terhadap BPK melalui Media Sosial dan Media Massa"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-16	Operasional -Cyber dan Teknologi Informasi	Jarang Terjadi (2)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (21)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisa Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisa Risiko: Bes	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Rendah	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kejadian	5 Hampir Pasti Terjadi	6	17	18	21	25
	4 Bintang Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Endang Terjadi	3	10	14	17	21
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	15	20
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	12

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Permenpan No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. POS Manajemen Komunikasi Krisis BPK. Peraturan Sekjen No.25 Tahun 2018 tentang POS Pengelolaan Media Sosial BPK. 	Melakukan kerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk penyampaian informasi berimbang yang benar dan sesuai fakta.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-17. Kebocoran dan Penyalahgunaan Data BPK, Data Pribadi dan Data Pihak Lain yang Diperoleh BPK"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Setelah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-17	Operasional -Cyber dan Teknologi Informasi	Kadang Terjadi (3)	Signifikan (4)	Tinggi (17)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Penerapan SPBE. Penggantian <i>password</i> secara berkala. Penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik pada laporan yang dihasilkan dari Aplikasi Pemeriksaan BPK. Pembatasan hak akses terhadap aplikasi dan database pemeriksaan BPK. Implementasi berbagai <i>tools</i> dan <i>software</i> terkait pengamanan perangkat dan jaringan TI. Pelaksanaan audit TI termasuk pengujian kemanan secara berkala terhadap infrastruktur dan jaringan TI. Sosialisasi terkait pentingnya keamanan data kepada seluruh pegawai BPK. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan pengamanan sarana dan prasarana secara berkala yang digunakan untuk menyimpan data BPK. Melaksanakan sosialisasi secara berkala terkait akses dan penggunaan data BPK.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko	5-6	Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	8	15	18	20	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kedera Terjadi	4	10	14	17	21
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	16
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	11

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

**Profil Risiko "RO-18. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPK
belum Didukung oleh Sarana/Prasarana dan Teknologi Informasi yang Memadai"**

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-18	Operasional -Cyber dan Teknologi Informasi	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Standar sarpras dan SiAP. Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi Melati untuk melayani permintaan dan pemenuhan layanan TI 	Melakukan inventarisasi dan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemeriksaan secara periodik.

Matris Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko S&S	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Sangat Tinggi Terjadi	9	15	18	20	25
	4 Tinggi Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Sedang Terjadi	4	10	14	17	20
	2 Rendah Terjadi	3	7	11	13	16
	1 Sangat Rendah Terjadi	1	5	8	9	11

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-19. *Database* Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan tidak Terintegrasi dan Berintegritas"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-19	Operasional - <i>Cyber</i> dan Teknologi Informasi	Kadang Terjadi (3)	Signifikan (4)	Tinggi (17)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
End	Eks	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
		Level Kemungkinan	5	8	15	16
4	6		12	16	19	24
3	4		10	14	18	23
2	2		7	11	15	20
1	1		3	5	8	12

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>Big Data Analytics</i>. 2. Tata Kelola TIK yang antara lain mengatur dalam pengembangan aplikasi harus memperhatikan interoperabilitas, yaitu kapabilitas suatu aplikasi untuk dapat berfungsi dengan baik pada saat berinteraksi dan dihubungkan dengan aplikasi lainnya, tanpa ada pembatasan waktu maupun akses, serta pembatasan implementasi. 3. Portal BPK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan mekanisme penyediaan dan pemanfaatan data yang dibutuhkan oleh satker terkait. 2. Menyusun mekanisme validasi berjenjang atas <i>database</i> untuk menjamin <i>Data Integrity</i>.

Level Risiko	Rentan Risiko	Warna
Sangat Tinggi (25)	20 - 25	Merah
Tinggi (17)	16 - 20	Oranye
Sedang (13)	12 - 16	Kuning
Rendah (7)	6 - 12	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 6	Biru

Profil Risiko "RO-20. Kehilangan Data Penting baik terkait Pemeriksaan ataupun Non Pemeriksaan"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-20	Operasional -Cyber dan Teknologi Informasi	Kadang Terjadi (3)	Moderat (3)	Sedang (14)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisa Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisa Risiko: Bes	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Rendah	3 Moderat	4 Tinggi	5 Sangat Signifikan	
Level Kejadiannya	5 Hampir Pasti Terjadi	6	17	18	20	25
	4 Banyak Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	21
	2 Jarang Terjadi	3	7	11	15	20
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	11

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan <i>multifactor authentication</i> (MFA). (Setjen). Mekanisme otorisasi pemberian akses data informasi pemeriksaan. (Setjen). Perpres No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Permenpan No.5 Tahun 2020 Tentang Manajemen Risiko SPBE. Reviu Berkala atas keamanan TI. 	<ol style="list-style-type: none"> Mekanisme otorisasi pemberian akses data informasi pemeriksaan. Melakukan sosialisasi implementasi <i>disaster recovery plan</i> secara berkala.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-21. Kalah dalam gugatan hukum atas LHP BPK yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-21	Operasional -Hukum	Jarang Terjadi (2)	Sangat Signifikan (5)	Sangat Tinggi (21)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
Level Kejuruan	Tidak Signifikan	3	15	18	20	25
	Sangat Signifikan	5	12	16	19	24
Level Risiko	Tinggi	3	16	14	17	21
	Rendah	5	7	11	13	18
Level Risiko	Sangat Rendah	1	3	5	8	10
	Rendah	1	2	4	6	8

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. 2. Keputusan BPK No. 5 Tahun 2015 tentang PMP. 3. Keputusan BPK No. 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu. 4. Keputusan BPK No. 6 Tahun 2020 tentang Enam Pilar Standar Pengendalian Mutu Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Perangkat Lunak Pemeriksaan Lainnya (Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis). 6. Pendidikan dan Pelatihan selama 40 Jam dalam setahun. 7. Keputusan Sekjen No. 484 Tahun 2015 tentang POS Pendampingan Hukum Perkara Pidana. 8. Keputusan Sekjen No. 235 Tahun 2014 tentang POS Penanganan Gugatan Hukum. 9. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2020 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan. 10. Keputusan Sekjen No. 686/K/X-XIII.2/12/2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata terhadap Badan Pemeriksa Keuangan 11. Keputusan Sekjen No. 235/K/X-XIII.2/5/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Badan Pemeriksa Keuangan. 	<p>Melaksanakan reuiu berjenjang atas temuan pemeriksaan serta KKP nya.</p>

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	8 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-24. Wanprestasi Penyedia Barang dan Jasa"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-24	Operasional - Hukum	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Sekretariat	Rendah

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Perka LKPP No.18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengendalian atas pelaksanaan kontrak oleh PPK. Memberikan sanksi sesuai kontrak.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko IndS	Level Dampak					
	1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	6	12	18	24	30
	4 Sering Terjadi	8	16	24	32	40
	3 Kadang Terjadi	12	24	36	48	60
	2 Jarang Terjadi	16	32	48	64	80
	1 Hampir Tidak Terjadi	20	40	60	80	100

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Profil Risiko "RO-25. Adanya Pimpinan /Pelaksana yang Terinfeksi Penyakit Menular yang Membahayakan"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-25	Operasional -Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Hampir Pasti Terjadi (5)	Moderat (3)	Tinggi (18)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

Matriks Analisis Risiko SAS	Tingkat Signifikan	Level Dampak				
		1	2	3	4	5
Level Kemungkinan	1. Hampir Pasti Terjadi	1	2	3	4	5
	2. Sering Terjadi	2	3	4	5	6
	3. Kadang Terjadi	3	4	5	6	7
	4. Jarang Terjadi	4	5	6	7	8
	5. Hampir Tidak Terjadi	5	6	7	8	9

SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>. 2. ND Sekjen No. 1204 Tahun 2020 tentang Informasi Pelaksanaan Isolasi Mandiri sebagai Upaya Penanganan & Pencegahan Penularan serta Penyebaran <i>Covid-19</i>. 3. Nota Dinas Sekjen No. 1160/ND/X/11/2020 terkait Informasi Pemeriksaan Indikasi <i>Covid-19</i>. 4. Perubahan Keempat atas SE Sekjen BPK No. 05/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang Mekanisme Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Pencegahan (<i>Covid-19</i>) di Lingkungan Pelaksana BPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberlakukan protokol kesehatan ketat pada saat dilakukan WFO. 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 3. Memberlakukan tes PCR/ <i>rapid antigen</i> pada kegiatan yang bersifat fisik dan melibatkan banyak orang.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru


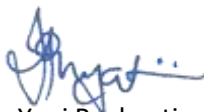

Profil Risiko "RO-26. Keselamatan Jiwa Pimpinan/Pelaksana dan Keluarga Terancam (Di Kantor atau Rumah)"

No	Jenis Risiko	Level Kejadian (LK)	Level Dampak (LD)	Level Risiko (LR)	Penanggung Jawab	Residual Risk Sesudah Penanganan
Risiko Operasional						
RO-26	Operasional -Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Jarang Terjadi (2)	Moderat (3)	Rendah (11)	1.Kepala Perwakilan 2.Kepala Subauditorat 3.Kepala Sekretariat	Rendah



SPI Saat Ini	Rencana Aksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan melekat berjenjang atas penerapan protokol keselamatan kerja. 2. Peraturan yang mewajibkan pegawai dan keluarganya (WNI) dalam kepesertaan BPJS: <ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (diperbaharui dengan Perpres No.64 Tahun 2020). 3. Klinik Dokter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi kepada pegawai mengenai prosedur keselamatan kerja di lingkungan perkantoran atau pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan. 2. Mengalokasikan anggaran untuk asuransi jiwa dan kesehatan pegawai terutama bagi Pimpinan dan Pemeriksa. 3. Melaksanakan tugas pemeriksaan yang mengutamakan keselamatan pemeriksa (koordinasi dengan APH untuk pemeriksaan di daerah konflik/berisiko tinggi). 4. Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja.

Level Risiko	Skor Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Hijau

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:
Admin Risiko  Hanggit Rani Wijayanti	Manajer Risiko  Yani Rochyati	Pejabat Kepatuhan  Ari Endarto	Pemilik Risiko Emmy Mutiarini
Tanggal: 22 Juni 2023	Tanggal: 22 Juni 2023	Tanggal: 23 Juni 2023	Tanggal: 23 Juni 2023